

KEUANGAN INKLUSIF DAN LITERASI KEUANGAN (Studi Pada Sentra industri kecil di Jawa Timur)

by Eko Purwanto

Submission date: 18-Jun-2020 10:01PM (UTC-0700)

Submission ID: 1346361755

File name: 88-175-1-PB.pdf (1,012.79K)

Word count: 3061

Character count: 19951

KEUANGAN INKLUSIF DAN LITERASI KEUANGAN

(Studi Pada Sentra industri kecil di Jawa Timur)

**Muhadjir Anwar, Eko Purwanto,
R. A. Suwaidi*, dan Mas Anienda****
*Program Studi Manajemen FEB UPN
“Veteran” Jawa Timur
** Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa
Timur

Jl. Raya Rungkut Madya-Gunung Anyar
Surabaya 60294
E-mail : muhadjira.anwar@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel

Diterima tanggal 16 September 2016

Direvisi tanggal 19 Februari 2017

Disetujui tanggal 23 November 2017

Klasifikasi JEL

G29; L69

Kata Kunci

Inclusive finance;

Financial literacy

DOI

10.17970/jrem.17.170209.ID

ABSTRACT

Financial inclusion is all effort purposing to eliminate the obstacles against the access of the society in utilizing financial services. After the implementation of inclusive financial strategy in Indonesia, especially in East Java Province the level of financial inclusion is better than Central Java Province, but is lower than West Java Province. The problem more lies on the bad perception of the savings product offered by commercial banks. The research aims (1) to understand financial literacy to improve the knowledge about financial aspect for small medium business; (2) to build a model of inclusive financial system for small medium business. The study is an explorative descriptive research trying to provide a description whether data or argument about financial inclusion in center of small industry in East Java Province. The method used in the research is training, in depth interview, and focus group discussion (FGD) with stakeholders. The research result concludes that (1) Most of small medium business produces durable consumer goods, (2) The formation of small medium business is more through production process, (3) The level of financial literation of small medium business needs to be improved, and (4) The model development of inclusive finance through three phase. 1st phase is the phase to build the trust, 2nd phase is the certainty of that bank should provide the certainty of easy, not complicated, and proactive services against the demand of small medium business, and 3rd phase is education.

PENDAHULUAN

Peranan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan ekonomi di Indonesia masih menjadi hal yang krusial, mengingat dominasi perbankan dari sistem lembaga keuangan yang mencapai 90%. Namun demikian, berdasarkan Penelitian World Bank Bank Dunia telah melakukan kajian terkait dengan inklusi keuangan dalam format yang disebut Global Financial Index (Global Findex) tahun 2012 terungkap “hanya 32% penduduk Indonesia yang memiliki akses ke perbankan”. Akses disini dapat diartikan

dalam fungsi untuk tujuan simpanan dan pinjaman. Kondisi ini mendorong suburnya pertumbuhan lembaga keuangan non formal atau biasa disebut tengkulak/rentenir di daerah pedesaan. (Sumber : World Bank, 2011).

Dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh World Bank di berbagai negara mengungkapkan bahwa keterlibatan sektor keuangan (keuangan inklusif) berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi disparitas pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, Bank Indonesia mengharapkan melalui program keuangan inklusif diharapkan dapat mengurangi dominasi rentenir di pelosok daerah.

Keuangan inklusif (*financial inclusion*) pada hakekatnya adalah seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Berdasarkan penelitian *world bank* beragam negara telah mengimplementasikan keuangan inklusif dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan, mengurangi disparitas pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, perumusan strategi nasional keuangan inklusif telah diluncurkan awal tahun 2013, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan menciptakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Survei Bank Dunia (2010) menunjukkan hanya 49% rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Hal serupa ditemukan Bank Indonesia dalam Survei Neraca Rumah Tangga 2011 yang menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48%. Dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki tabungan sama sekali baik di

bank maupun di lembaga keuangan non bank masih relatif sangat tinggi yaitu 52%. (Bank Indonesia, 2011). Kedua survei tersebut saling menguatkan dan mendukung bahwa akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal dan non formal masih relatif rendah sehingga penduduk Indonesia yang memiliki akses yang terbatas terhadap sistem jasa keuangan masih perlu ditingkatkan. Dengan meningkatkan akses masyarakat ke perbankan diharapkan tingkat kemiskinan dapat berkurang, mendorong tercapainya pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anwar et. Al (2015) pada sentra industri kecil di sepuluh kabupaten/Kota di Jawa timur, dengan mendasarkan indeks inklusi keuangan dalam penelitian Sarma (2012;14-17) sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan suatu wilayah, antara lain: indikator penetrasi perbankan, indikator aksesibilitas jasa keuangan (perbankan), dan indikator *usage* (penggunaan) rekening di masyarakat.

Indikator penetrasi perbankan menjelaskan tentang sejauh mana masyarakat telah memiliki nomor rekening di perbankan. Hal ini dapat menunjukkan *financial awareness* (kesadaran keuangan) pada masyarakat untuk memanfaatkan produk perbankan. Dengan mendasarkan pada indikator penetrasi perbankan yang ditunjukkan dengan kepemilikan rekening pada bank menunjukkan bahwa pengusaha pada kesepuluh sentra industri memiliki *financial awareness* (kesadaran keuangan) yang tinggi dalam memanfaatkan produk perbankan. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa semakin banyak masyarakat (pengusaha UKM) yang terlayani oleh perbankan;

Indikator aksesibilitas perbankan menjelaskan tentang sejauh mana industri perbankan mampu menjangkau masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Apabila industri perbankan mampu diakses dengan

mudah oleh masyarakat secara luas, maka masyarakat akan mudah untuk mengenal dan memanfaatkan produk perbankan, sehingga jelas hal ini dapat berdampak pada perilaku keuangan personal masyarakat tersebut

Pada Responden (pengusaha UKM) yang tidak memiliki rekening pada Bank, dalam hubungannya dengan indikator aksesibilitas responden masih merasakan hambatan dalam memperoleh layanan jasa keuangan formal dari perbankan.. Tingginya biaya administrasi bulanan dan besaran persyaratan saldo minimum merupakan hambatan akan akses tabungan formal. Selain alasan di atas, juga disebabkan rendahnya penghasilan responden sehingga pendapatan yang diterima responden cukup untuk membiayai kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Pada Indikator *usage* (penggunaan rekening) ini diartikan sebagai bentuk fungsi dari kepemilikan rekening yang digunakan untuk bertransaksi dalam sistem keuangan. Berdasarkan pada tabel di atas, dalam hubungannya dengan kepemilikan ATM/Kartu Debit, seluruh responden pada semua sentra industri kecil memiliki ATM/Debit, maka dapat dijelaskan bahwa responden sudah menggunakan produk perbankan yaitu ATM/Kartu Debit untuk keperluan transaksi usahanya. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan rekening masih belum dapat merepresentasikan bahwa pemilik rekening akan menggunakan secara maksimal dalam produk-produk perbankan, karena sebagian besar responden dalam penggunaan produk perbankan instensitasnya masih rendah sesuai dengan kebutuhan responden.

Hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa responden masih membutuhkan modal eksternal/hutang yang bersumber dari bank dan masih merupakan sumber utama modal eksternal responden. Modal eksternal/hutang ini sangat dibutuhkan responden dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan usaha. Hal ini memperjelas jika responden (pengusaha

ukm) pada kesepuluh sentra industri memiliki kemampuan yang rendah dalam menghimpun dana internal sebagai sumber dana untuk operasional usahanya.

KERANGKA TEORITIS

Keuangan Inklusif di Indonesia

Menurut buku keuangan inklusif (2014), Keuangan Inklusif (*Financial Inclusion*) adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan yang dihadapi masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa keuangan. Keuangan inklusif juga merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan stabilitas sistem keuangan.

Survei Bank Dunia (2010) menunjukkan bahwa hanya 49 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Bank Indonesia melalui Survey Neraca Rumah Tangga (2011) menunjukkan bahwa hanya 48 persen rumah tangga di Indonesia yang menyimpan tabungan mereka pada lembaga keuangan formal. Akses yang buruk terhadap jasa keuangan disebabkan oleh rendahnya pendapatan, rumitnya prosedur layanan perbankan, kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai layanan lembaga keuangan, tingginya biaya administrasi layanan jasa keuangan, dan sulitnya akses transportasi menuju lokasi bank berada.

Dalam strategi nasional keuangan inklusif, upaya keuangan inklusif mencakup 6 (enam) pilar, yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan layanan keuangan, kebijakan/regulasi pendukung, fasilitas distribusi dan kelembagaan, dan perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan program keuangan inklusif yang berkesinambungan dan meningkatkan akses terhadap jasa keuangan, kiranya dibutuhkan koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan K/L terkait, prioritas pelaksanaan program yang tepat, serta pengawasan pelaksanaan program yang ketat.



DIAGRAM 1.
KOMPONEN FINANCIAL INCLUSION
 Sumber: Alliance for Financial Inclusion (2010)

Keuangan inklusif merupakan konsep yang multi disiplin dan terdiri atas beberapa komponen, yang semuanya relevan dengan agenda pembangunan di sebuah negara. Bank Indonesia (2014) memandang bahwa untuk mengetahui sejauh mana perkembangan proses keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Alliance for Financial Inclusion (2010) secara umum mendefinisikan kompleksitas keuangan inklusif ke dalam 4 (empat) komponen, sebagai berikut:

Access

Komponen ini terutama menekankan pada kemampuan untuk menggunakan layanan jasa keuangan dan produk-produk yang disediakan oleh lembaga keuangan formal. Untuk memahami tingkatan akses atas jasa keuangan dibutuhkan analisa dan pengetahuan mengenai potensi hambatan-hambatan yang terjadi ketika membuka dan menggunakan rekening bank untuk segala urusan, serta biaya dan lokasi pelayanan bank.

Quality

Sebagai ukuran atas kesesuaian jasa atau produk keuangan terhadap kebutuhan konsumen, komponen kualitas mencakup pengalaman konsumen yang ditunjukkan dalam opini dan sikap tentang produk-produk

jasa keuangan yang tersedia bagi mereka. Kualitas akan menjadi alat ukur hubungan antara penyedia jasa keuangan dan konsumen, serta pilihan-pilihan produk keuangan yang tersedia dan tingkat pemahaman konsumen atas implikasi dari produk keuangan pilihannya.

Usage

Tidak hanya menekankan pada penggunaan layanan perbankan, komponen *usage* lebih memfokuskan pada aspek *permanence and depth* dari layanan dan produk sektor keuangan di sebuah negara. Dengan kata lain, komponen *usage* menjelaskan secara detail mengenai frekuensi dan durasi penggunaan layanan dari sebuah produk jasa keuangan. Selain itu, komponen *usage* juga mengukur kombinasi produk-produk keuangan yang digunakan oleh rumah tangga atau individu.

Welfare

Salah satu komponen tersulit adalah mengukur dampak dari suatu produk atau layanan jasa keuangan terhadap konsumen, seperti perubahan pada pola konsumsi, aktivitas usaha dan investasi, serta kesejahteraan.

Inklusi keuangan akan mampu mempengaruhi perilaku keuangan personal masyarakat. Perilaku keuangan personal ini didefinisikan oleh Nababan dan Isfenti (2013:5) adalah sikap dan tata cara seseorang memperlakukan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan yang ada padanya. Ardiani (2011:120) menjelaskan lebih detail lagi tentang mengelola keuangan, yaitu proses yang dimulai dari merencanakan, melaksanakan dengan disiplin, dan melakukan evaluasi atau revisi jika diperlukan. Maka dari itu, di dalam mengelola keuangan personal diperlukan peran industri perbankan sebagai salah satu roda penggerak dalam aktivitas perekonomian sehari-hari termasuk untuk aktivitas keuangan pada lingkup rumah tangga, seperti untuk memperoleh alternatif sumber daya keuangan karena kekurangan finansial atau untuk tujuan aktivitas produktif seperti keperluan modal usaha. Selain itu juga untuk dimanfaatkan oleh masyarakat melalui produk tabungan dengan tujuan mendapatkan tingkat pengembalian tertentu. Aktivitas seperti ini secara tidak langsung telah memberi pelajaran bagi masyarakat untuk memiliki perilaku keuangan personal yang baik dan dapat mengelola keuangan secara cerdas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

Pernyataan terkait pengaruh inklusi keuangan terhadap perilaku keuangan personal didukung oleh pernyataan Allen *et al.* (2012:34) yang menjelaskan bahwa inklusi keuangan dapat membawa banyak manfaat kesejahteraan untuk individu. Pemerintah yang memiliki kebijakan untuk mengembangkan inklusi keuangan dapat meningkatkan persepsi orang yang merasa bahwa jasa keuangan (perbankan) ada dalam jangkauan mereka. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, tema keuangan inklusif telah menjadi salah satu topik studi keuangan yang menarik. Secara sederhana, keuangan inklusif dapat dimaknai sebagai suatu sistem layanan keuangan yang pengelolaannya bersifat universal

atau noneklusif. Yang dimaksud dengan universal atau noneklusif adalah bahwa sistem keuangan yang ada dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, bukan hanya kelompok masyarakat menengah atas, tetapi juga kelompok masyarakat miskin. Dengan demikian, model layanan atau jasa keuangan yang dijalankan bersifat nondiskriminatif. Umumnya, keuangan inklusif mengambil bentuk pembiayaan mikro dalam bentuk kredit usaha yang ditujukan pada usaha skala kecil dan menengah, baik perorangan maupun institusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif yang mencoba memberikan gambaran baik berupa data maupun argumen tentang keuangan inklusif di sentra industri kecil di Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pelatihan, *In Depth Interview* dan diskusi dalam format Focus Grup Discussion (FGD) dengan berbagai stakeholders yang terkait dengan keuangan inklusif sehingga diperoleh model pengembangan keuangan inklusif yang dapat diharapkan membantu memecahkan persoalan keuangan inklusif pada UKM di Jawa Timur.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2013 didapati bahwa hanya 21.8 persen masyarakat Indonesia yang tergolong *financial well literate*. Yang dimaksud dengan *financial well literate* adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang produk dan jasa lembaga keuangan, termasuk memahami risiko, hak dan kewajibannya, serta memiliki keterampilan menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan. Kendala dari sisi permintaan yang lainnya adalah dalam wujud tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, khususnya di pedesaan, yang membuat belum tentu adanya pendapatan berlebih (setelah konsumsi) yang dapat

diakumulasikan menjadi tabungan. Kalaupun ada, perihal apakah kelebihan pendapatan tersebut besarnya layak atau tidak menjadi persoalan yang juga perlu diperhatikan. Fakta-fakta ini yang sekiranya menjadi hambatan laten di dalam mengakselerasi perluasan akses dan pendalaman sektor keuangan di Indonesia

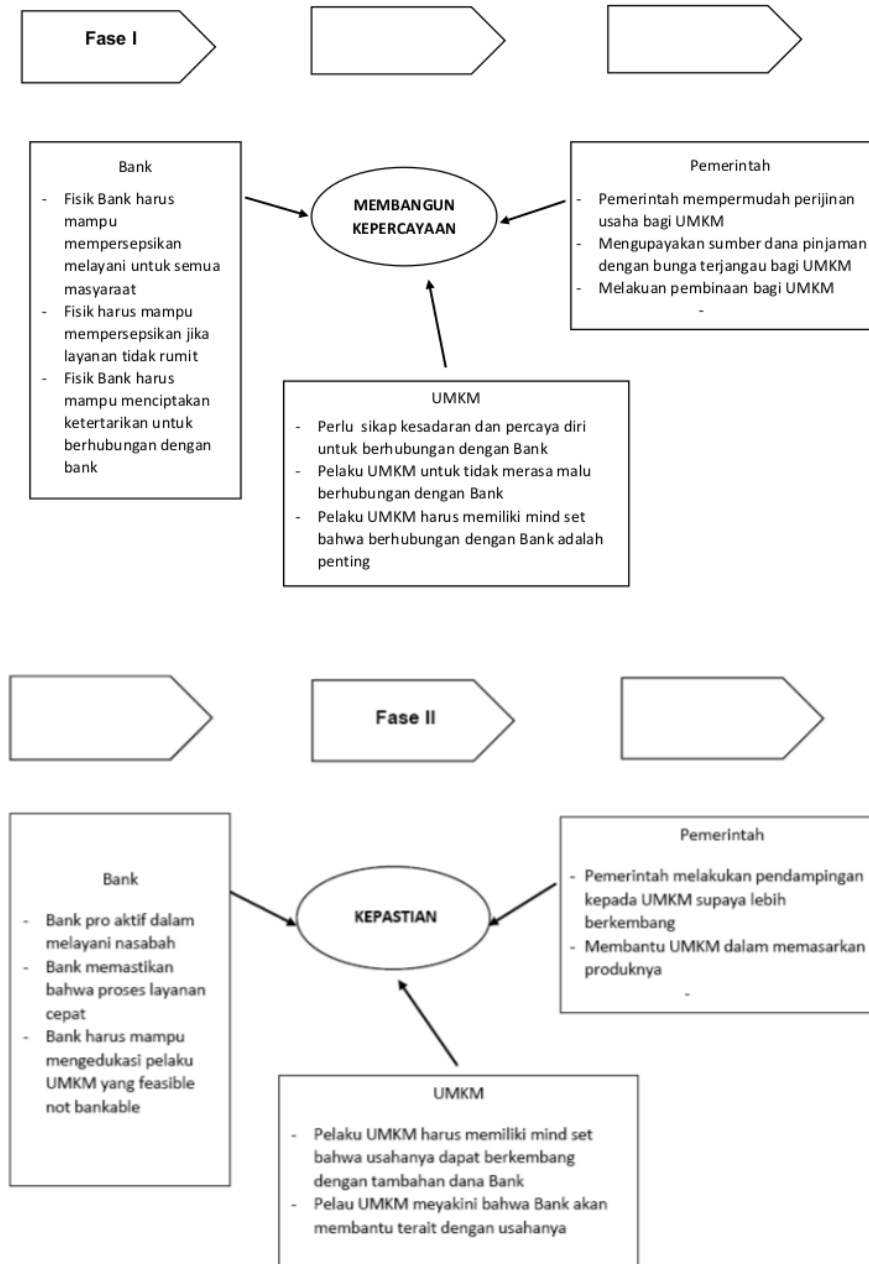
Pada umumnya pelaku usaha pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana (uang masuk dan keluar) keuangan perusahaan belum dipisahkan dengan keuangan keluarga, belum membuat arus kas dan neraca usaha. Pemahaman terhadap investasi masih kurang, khususnya pada indikator-indikator tersebut. Agar pelaksanaan program dapat berkelanjutan, secara persuasif perlu ditanamkan pemahaman pada UMKM bahwa kredit usaha yang diberikan bukanlah pemberian gratis, tapi harus dikembalikan dengan tingkat bunga tertentu. Artinya, ada kewajiban yang melekat dari pemberian kredit tersebut. Yang mana kewajiban tersebut akan dapat terlaksana dengan baik apabila mereka mampu mengolah kredit usaha yang didapatkan dengan usaha dan kerja keras. UMKM perlu disadarkan secara simpatik bahwa pemberian kredit di masa mendatang akan sangat ditentukan dari kesiediaan dan kemampuan mereka untuk membayar kreditnya. Yang dengan kata lain, meningkat atau tidak taraf hidupnya akan sangat dipengaruhi oleh akses permodalan yang dimilikinya. Kesadaran akan hidup, atau jaminan keberlangsungan hidup ini, oleh Muhammad Yunus, dikatakan jauh lebih penting daripada agunan apapun.

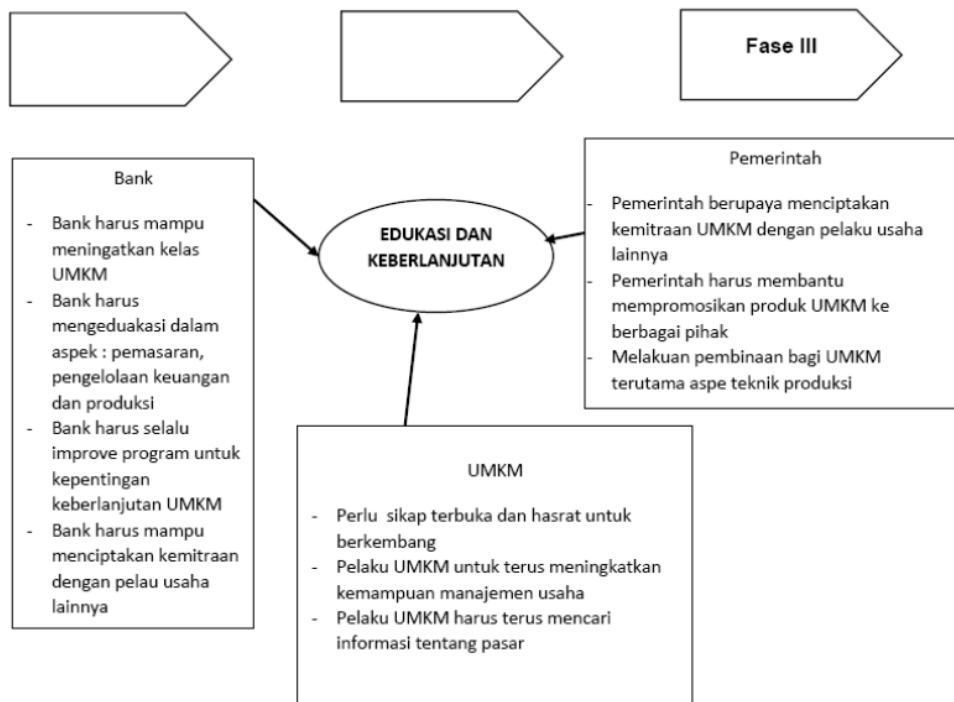
Pada umumnya pelaku usaha pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana (uang masuk dan keluar) keuangan perusahaan belum dipisahkan dengan keuangan keluarga, belum membuat arus kas dan neraca usaha. Pemahaman terhadap investasi masih kurang, khususnya

pada indikator-indikator tersebut. Begitu pula sebaliknya, masyarakat yang berada pada wilayah dengan indeks inklusi keuangan yang rendah dapat dikatakan masih belum memiliki perilaku keuangan personal yang baik atau belum mampu mengelola keuangan personal secara bijak.

Pada indikator membuat anggaran, dijelaskan melalui beberapa item yaitu anggaran harian, anggaran bulanan, dan perencanaan keputusan keuangan. Seseorang dengan perilaku keuangan personal yang baik berarti telah mampu secara baik membuat penganggaran (*budgeting*) dalam aktivitas sehari-harinya. Penganggaran tersebut baik dilakukan secara harian maupun bulanan. Selain itu, dia juga mampu dengan baik untuk berpikir secara masak dalam membuat perencanaan-perencanaan keuangan yang akan diputuskan (direalisasikan) dalam beberapa jangka waktu ke depan Seseorang dengan perilaku keuangan yang tidak baik akan cenderung menggunakan cara-cara yang singkat apabila berada pada posisi keuangan yang terdesak. Bahkan tidak jarang mereka menggunakan jasa para rentenir yang sebenarnya hal tersebut benar-benar justru akan membuat kondisi keuangannya sengsara pada masa yang akan datang.

Model Pengembangan Keuangan Inklusif





DAFTAR PUTAKA

Allen, Franklin., Kunt, Asli Demircuc., Klap- per, Leora., Martinez Peria, Maria Soledad. 2012. *The Foundations of Financial Inclusion, Understanding Ownership and Use of Formal Account*. The World Bank

Ardiani Ika S. 2011. *Personality Traits* sebagai Penentu Perencanaan Keuangan Keluarga (Suatu Kajian Pustaka). *Jurnal Pengembangan Humaniora*. Vol. 11, No. 2, Agustus 2011, Hal. 118-126

Bank Indonesia (2014), *Booklet of Indonesian Financial Inclusion*, Financial Inclusion Development Group, Jakarta

Bankable Frontier Associates (2010), *Financial inclusion measurement for regulators: Survey design and implementation*, Alliance for Financial Inclusion (AFI) Policy Paper, Bangkok

Beck, Demircuc-Kunt dan Levine (2007), *Finance, Inequality and the Poor: Cross-Country Evidence*, **Journal of Economic Growth** 12(1): 27-49

Bruhn dan Love (2009), *The Economic Impact of Banking the Unbanked: Evidence from Mexico*, World Bank Policy Research Working Paper 4981

Devi, Abrista dan Aam S. Rusydiana, 2013, **Islamic Group Lending Model (GLM) dan Keuangan Inklusif: Studi Dampak dan Strategi Pengembangan**, Makalah Disampaikan Pada Seminar Perbankan Syariah, Jakarta,

Direktorat Kredit. BPR dan UMKM. BI. 2011. **Peningkatan Daya Saing BPR Untuk Meningkatkan Perannya Dalam Melayani UKM**. INDONESIA BANKING EXPO. Disampaikan Dalam Seminar. Jakarta Convention Center-13 Mei 2011.

Insani, Fiyantama Akbar, 2013, **Family Funding Dan Formal Funding Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Jepara**, Thesis,

Anwar, Muhadjir, 2015, **Model Pengembangan Keuangan Inklusif Pada Sentra Usaha Kecil Menengah Di Jawa Timur**, PUPT

⁶ Musari, 2013, **Financial Inclusion dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Investasi Ustadz Yusuf Mansyur dan Investasi Emas Berlabel Syariah** Published, Makalah ini disampaikan pada kegiatan sosialisasi dan edukasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nababan, Darman dan Isfenti Sadalia. 2013. Analisis Personal Financial Literacy dan Financial Behavior Mahasiswa Strata I Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. *Thesis*, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara

⁶ UN Capital Development Fund (2014), **Doubling Financial Inclusion in the ASEAN Region by 2020**, Asia Pacific Regional Centre (APRC), Bangkok

Wahyudin, D. 2004. **Key Success Factors In MicroFinancing**. Paper pada Diskusi Panel *Microfinance Revolution: Future Perspective for Indonesian Market*. Jakarta

World Bank (2014), Financial Inclusion, Global Financial Development Report, Washington D.C.

Worokinasih, Saparila, 2011, **Penguatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**, Jurnal akuntansi, manajemen bisnis dan Sektor publik (JAMBSP) Vol. 7 No. 2 – Pebruari : 252 – 271

KEUANGAN INKLUSIF DAN LITERASI KEUANGAN (Studi Pada Sentra industri kecil di Jawa Timur)

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	6%
2	www.kompasiana.com Internet Source	5%
3	www.bi.go.id Internet Source	4%
4	sipeg.unj.ac.id Internet Source	2%
5	www.researchgate.net Internet Source	2%
6	eprints.upnjatim.ac.id Internet Source	2%
7	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	2%

KEUANGAN INKLUSIF DAN LITERASI KEUANGAN (Studi Pada Sentra industri kecil di Jawa Timur)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10
